

Rekanan Kembalikan Rp 655 Juta

BPK Perwakilan Jateng.

BPK Audit 10 Proyek Jalan

SRAGEN - Sejumlah 10 rekanan ramai-ramai mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek ke kas daerah pada Juni lalu. Upaya itu dilakukan para kontraktor menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 655,7 juta.

Selain adanya pengembalian itu, Pemkab Sragen mendapatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD 2014 mencapai Rp 245.773.918.000. Nilai Silpa itu diketahui berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, antara Pemkab

■ Baca **REKANAN KEMBALIKAN**...hal 15

REKANAN KEMBALIKAN

dari hal 16

Sragen dengan DPRD Sragen yang berakhir Senin (10/8). Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Senin (10/8), Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto mewakili Bupati Agus Fatchur Rahman membacakan rancangan kebijakan umum perubahan APBD 2015. Dalam rancangan tersebut dijelaskan bila Silpa pada rancangan APBD 2015 Perubahan sebesar Rp 245.773.918.000.

Jumlah ini mengalami penambahan Rp 173.428.096.000 bila dibandingkan saat penetapan APBD

2014 yang hanya sebesar Rp 73.345.822.000. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Untung Sugihartono menjelaskan, dari jumlah itu, penghasil Silpa terbesar dari item tunjangan sertifikasi bagi para guru yang ada di Kabupaten Sragen.

"Silpa dari tunjangan sertifikasi guru termasuk gaji ini mencapai Rp 67 miliar," kata Untung. Selain itu, besaran Silpa juga berasal dari kelebihan pendapatan Rp 55 miliar dan sisa tender pelaksanaan proyek pembangunan Rp 29 miliar, serta dari Dana

Alokasi Khusus (DAK).

Untung mengatakan, Silpa yang berasal dari tunjangan sertifikasi guru memang tidak bisa diserap atau digunakan untuk kepentingan yang lain. Karena anggaran itu dikururkan oleh pemerintah pusat dan sudah jelas peruntukannya. Dia juga mengungkapkan ada 10 rekanan pekerjaan pemeliharaan jalan di 10 lokasi pada 2014 mengembalikan sisa proyek.

Sementara itu Ketua DPRD Bambang Samekto mengatakan, jika memang ada Silpa yang harus dikembalikan ke pusat me-

ng harus kembali ke pusat, karena tidak ada yang berhak menerima. Namun kalau masih ada yang bisa digunakan untuk pembangunan di Sragen maka harus dilaksanakan pada anggaran perubahan.

Dia juga menjelaskan, ketika APBD digedok pada implementasi pelaksanaannya ternyata ada juga yang payung hukumnya mengalami perubahan, sehingga Pemkab tidak berani melaksanakannya. "Pemkab memang harus cermat dan teliti dalam setiap penggunaan anggaran," tandasnya. (ars/sgt)